

**TINJAUAN YURIDIS *LEGAL STANDING* PEMOHON DALAM UNDANG-
UNDANG NO. 8 TAHUN 2011
(Studi Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023)**

SKRIPSI

Oleh :

Rakha Adi Pragata

NIM. 05020721046



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah Dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Program Studi Hukum

Surabaya

2024

PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH

PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rakha Adi Pragata
NIM : 05020721046
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum
Judul : "Tinjauan Yuridis Legal Standing Pemohon Dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2011" (Studi Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Sarabaya, 11 November 2024

A 10,000 Rupiah postage stamp from Indonesia, featuring the Garuda Pancasila emblem and the text '10000 METERAI TEMPEL'. A handwritten signature is written over the stamp.

Rakha Adi Pragata

NIM. 05020721046

PERSETUJUAN PEMBIMBING

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Rakha Adi Pragata
NIM : 05020721046
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum
Judul : "Tinjauan Yuridis Legal Standing Pemohon Dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2011" (Studi Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023)

Telah diberikan bimbingan, arahan, dan koreksi sehingga dinyatakan layak, serta disetujui untuk diajukan kepada Fakultas guna diujikan pada sidang munaqasah.

Surabaya, 14 November 2024.

Pembimbing,



Dr. Arif Wijaya, S.H., M.Hum.

NIP . 197107192005011003

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Rakha Adi Pragata

NIM. : 05020721046

telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Senin, tanggal 2 Desember 2024, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Majelis Munaqasah Skripsi:

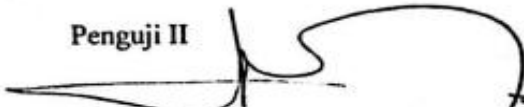
Penguji I



Dr. Arif Wijaya, S.H., M.Hum.

NIP : 197107192005011003

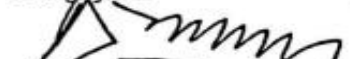
Penguji II



Prof. Dr. Titik Triwulan Tutik, S.H., M.H.

NIP : 196803292000032001

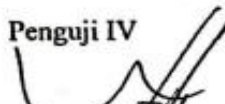
Penguji III



Dr. Lutfil Ansori, M.H.

NIP : 198311132015031001

Penguji IV



Elva Imeldatar Rohmah, M.H.

NIP : 199204022020122018

Surabaya, 2 Desember 2024

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel



Dekan,

Dr. Hj. Suryani Musatah, M.Ag.

NIP : 196303271999032001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Rakha Adi Pragata
NIM : 05020721046
Fakultas/Jurusan : Syariah & Hukum/Hukum
E-mail address : rakhapragata@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :

TINJAUAN YURIDIS LEGAL STANDING PEMOHON DALAM UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 2011
(Studi Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 17 Februari 2025

Pemulis

(Rakha Adi Pragata)

ABSTRAK

Pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 secara materiil memerlukan kriteria khusus guna menyaring setiap perkara yang dimohonkan untuk diadili di Mahkamah Konstitusi. Lahirnya Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023 dimana pemohon adalah mahasiswa yang menguji Pasal 169 huruf (q) UU No. 17 Tahun 2017 tentang Pemilu dengan petitum pasal tersebut dimaknai pernah menjabat sebagai kepala daerah. Skripsi ini menjawab pertanyaan yang dituangkan dalam dua rumusan masalah: bagaimana *legal standing* pemohon dalam UU No. 8 Tahun 2011; bagaimana keabsahan *legal standing* pemohon dalam Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif melalui studi pustaka. Yaitu, penelitian yang mendalami dimensi-dimensi suatu permasalahan yang ada di dalam dinamika hukum positif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Undang-undang yang digunakan sebagai sumber bahan hukum primer meliputi UUD 1945, UU No. 8 Tahun 2011 dan Putusan Mahkamah Konstitusi. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan: *pertama*, ketentuan *legal standing* pemohon diharuskan kerugian yang potensial dan memiliki sebab akibat dengan ketentuan undang-undang yang diuji. *Kedua*, *legal standing* pemohon dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XXI/2023 adalah tidak absah secara hukum karena pemohon bukanlah seorang yang sedang/pernah menjabat sebagai kepala daerah baik ditingkat provinsi maupun kabupaten/kota sehingga tidak adanya kesesuaian antara permohonan dan petitum. Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka saran dari penulis adalah: *Pertama*, karena Putusan MK menjadi suatu yurisprudensi, maka diperlukan konsistensi dalam memaknai segala hal termasuk *legal standing*. *Kedua*, terkait dengan kedudukan hukum pemohon yang akan mengajukan permohonan pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi diperlukan suatu pemahaman yang mendalam mengenai kerugian konstitusional dimana aspek ini mempengaruhi putusan perkara pengujian undang-undang



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR ISI

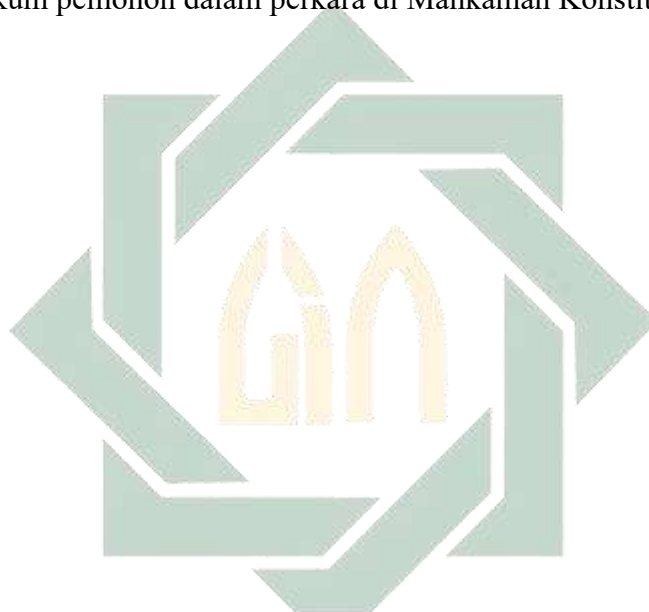
PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
ABSTRAK.....	viii
KATA PENGANTAR	ix
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	5
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan Penelitian.....	7
E. Manfaat Penelitian.....	7
F. Penelitian Terdahulu.....	8
G. Definisi Operasional.....	11
H. Metodologi Penelitian	12
I. Sistematika Pembahasan	14
BAB II.....	16
TINJAUAN UMUM <i>LEGAL STANDING</i> & RUANG LINGKUP UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 2011	16
A. <i>Legal Standing</i>	16
B. UU No. 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi	25
1. Pengujian Undang-Undang dalam UU No. 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi	28
2. Sengketa Kewenangan Lembaga Negara dalam UU No. 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi	29
3. Pembubaran Partai Politik dalam UU No. 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi.	29
4. Perselisihan Hasil Pemilihan Umum dalam UU No. 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi.	30
5. Pendapat DPR Mengenai Dugaan Pelanggaran Presiden Dan Wakil Presiden dalam UU No. 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi.....	31

BAB III	35
LEGAL STANDING DALAM UU NO. 8 TAHUN 2011 TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI.....	35
A. <i>Legal Standing</i> Pemohon dalam UU No. 8 Tahun 2011	35
B. Pemaknaan <i>Legal Standing</i> Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Terdahulu. 40	
1. Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Menguji Undang-Undang.....	40
2. Sifat & Asas Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi	42
3. Putusan Mahkamah Konstitusi Sebagai Yurisprudensi.	43
4. Putusan Mahkamah Konstitusi Yang Tidak Memberikan <i>Legal Standing</i> Terhadap Pemohon.....	44
C. Analisis <i>Legal Standing</i> Pemohon dalam UU No. 8 Tahun 2011	53
D. Analisis Pemaknaan <i>Legal Standing</i> dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Terdahulu.....	55
BAB IV	57
KEABSAHAN LEGAL STANDING PEMOHON DALAM PUTUSAN MK NO. 90/PUU-XXI/2023 PERIHAL PENGUJIAN UU NO. 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILU.....	57
A. Identifikasi Identitas Pemohon dalam Putusan MK NO. 90/PUU-XXI/202358	
B. Kerugian Konstitusional Pemohon dalam Putusan MK NO. 90/PUU-XXI/2023.....	58
C. Hubungan Sebab Akibat Antara UU No. 17 Tahun 2017 dengan Kerugian Pemohon dalam Putusan MK NO. 90/PUU-XXI/2023.....	61
D. Pertimbangan Hukum dalam Putusan MK NO. 90/PUU-XXI/2023.....	65
E. Pendapat Hakim Konstitusi dalam Putusan MK NO. 90/PUU-XXI/2023..	69
F. Analisis Keabsahan <i>Legal Standing</i> Pemohon Dalam Putusan MK NO. 90/PUU-XXI/2023.	73
BAB V	77
PENUTUP	77
A. Kesimpulan	77
B. Saran.....	78
DAFTAR PUSTAKA	80
Buku.....	80
Jurnal.....	80

LAMPIRAN	88
KARTU RENCANA STUDI.....	89
KARTU BIMBINGAN SKRIPSI.....	91
TURNITIN	92
PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH	93
LEMBAR PENGESAHAN PROPOSAL SKRIPSI	95
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	96

DAFTAR TABEL

Table 1 Subjek hukum pemohon dalam perkara di Mahkamah Konstitusi...	34
--	----



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Asshiddiqie, J. (2006). *Hukum Acara Pengujian Undang - Undang* . Jakarta: Konstitusi Press.
- Djatmiati, P. M. (2008). *Argumentasi Hukum*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press
- HR, R. (2006). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Hukum Acara Mahkamah Konstitusi* . (2010). Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- Jenderal, Sekretariat. "Hukum Acara Mahkamah Konstitusi." Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (2010).
- Mertokusumo, S. (2007). *Penemuan hukum : sebuah pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Maruarar, Siahaan. "Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia." Jakarta, Edisi Revisi, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI (2006).
- Muhtar, M. H. (2023). *Teori & Hukum Konstitusi : Dasar Pengetahuan dan Pemahaman serta Wawasan Pemberlakuan Hukum Konstitusi di Indonesia* . Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia .
- Marzuki, Peter Mahmud. "Buku Penelitian Hukum." Revisi (Jakarta: Prenadamedia Group, 2017) (2016).
- Qamar, N. (2013). *Hak Asasi Manusia dalam Negara Demokrasi* . Jakarta: Sinar Grafika.
- Tutik, Titik Triwulan, and MH SH. konstruksi hukum tata negara Indonesia pasca amandemen UUD 1945. Prenada Media, 2016.
- Tutik, Titik Triwulan. Pokok-pokok hukum tata negara Indonesia pascaamandemen UUD 1945. Cerdas Pustaka Publisher, 2008.

Jurnal

- Agung Bayu Adji, H. A. (2024). Konstitusionalitas Perubahan Usia Calon Presiden Dan Calon Wakil Presiden Dalam Negara Hukum Demokrasi. *Sentri Jurnal Riset Ilmiah, Vol. 3*(No. 1).
- Agustian, Sanggup Leonard. "Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Sebagai Batu Uji Bagi Hakim Dalam Memutus Sengketa Peradilan Administrasi Negara." *Jurnal Hukum Magnum Opus* 2.2 (2019).

- Ahmad Mudatsir, S. (2023). Melacak Kerancuan Legal Reasoning Dalam Putusan Mk 90/Puu-Xxi/2023: Analisis Dengan Metode Irac. *Peradaban Journal Law And Society*, Vol. 2 (No. 2). Doi:10.59001/132
- Aji, Alan Bayu. "Inkonsistensi Mahkamah Konstitusi tentang Pemberian Kedudukan Hukum Pemohon dalam Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 dengan Putusan Nomor 74/PUU-XVIII/2020." *Soedirman Law Review* 5.4 (2023).
- Ali, M. M. (2015). Konstitusionalitas Dan Legalitas Norma Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945. *Jurnal Konstitusi*, Vol. 12(No.1). Retrieved From https://www.researchgate.net/profile/Mohammad-Ali-67/publication/328217279_Konstitusionalitas_Dan_Legalitas_Norma_Dalam_Pengujian_Undang-Undang_Terhadap_Undang-Undang_Dasar_1945/links/5bc412da92851c88fd6a20ac/Konstitusionalitas-Dan-Legalitas-Norma-Dalam-P
- Amrin, Reza Nur, et al. "Status Hukum Hak Atas Tanah Yang Terkena Bencana Alam." *Tunas Agraria* 5.1 (2022).
- Aryani, C. (2021). Reformulasi Sistem Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Melalui Penerapan Omnibus Law. *Vol. 4*(No. 1). Retrieved From <https://journals.usm.ac.id/index.php/julr/article/view/3194>
- Aulia Ramadhani, S. W. (2024). Reformasi Birokrasi: Perlindungan Hak Pilih Aparatur Sipil Negara Berlandaskan Pilar Netralitas. *Jurnal Nomokrasi*, Vol. 2(No.1). Retrieved From <https://journal.unhas.ac.id/index.php/jnomokrasi/article/view/41587>
- Azhar, K. B. (2020). Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. *Gema Keadilan*, Vol. 7 (No. 1). Doi:10.14710/7504
- Beneduzi, Renato. "Ekuitas di Yunani." *Ekuitas dalam Tradisi Hukum Perdata*. Cham: Springer International Publishing, 2021.
- Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. *Gema Keadilan*, Vol. 7 (No. 1), 23. Doi:10.14710/7504
- Budahu, M. A. (2024). Legal Standing Pemohon Terkait Pengajuan Judicial Review Di Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Media Hukum*, Vol. 12(No. 1). Doi:10.59414/1.636

- Budyatmojo, W. (2022). Analisis Dampak Penundaan Pemilu 2024. *Jurnal Demokrasi Dan Ketahanan Nasional*, Vol. 1(No. 2).
Doi:<https://doi.org/10.13057/Sovereignty.V1i2.224>
- Bisariyadi, Bisariyadi. "Membedah Doktrin Kerugian Konstitusional." *Jurnal Konstitusi* 14.1 (2017).
- Chalid, H., & Yaqin, A. A. (2019). Menggagas Pelembagaan Constitutional Question Melalui Perluasan Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Menguji Undang-Undang : Initiating The Constitutional Question Institutionalization By Expanding The Constitutional Court's Constitutional Review Authority. *Jurnal Konstitusi*, Vol. 16 (No. 2). Doi:10.31078/1628
- Dairani, Dairani. "PROSEDUR PEMBUBARAN PARTAI POLITIK:(Kajian Perbandingan Konstitusi Indonesia Dengan Konstitusi Jerman)." *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora* 1.1 (2022): 106-120.
- Firdaus, Sunny Ummul, Putri Anjelina Nataly Panjaitan, and Rizky Kurniyanto Widysasmito. "Peran Dissenting opinion hakim konstitusi dalam pembaharuan hukum nasional." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 20.1 (2020).
- Firmantoro, A. A. (2024). Analisis Legal Standing Dan Konsistensi Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Materiil Uu Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum: Studi Kasus Putusan No.90/Puu-Xxi/2023. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik*, Vol. 4 (No. 2). Doi:10.38035/1856
- Hakim, A. R., Pratiwi, Y. D., Syahrir, S., Aliansa, W., & Palupi, A. A. (2023). Kekuatan Hukum Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi Mengenai Penjabat Kepala Daerah. *Jurnal Usm Law Review*, Vol. 6(No. 1). Retrieved From <https://journals.usm.ac.id/index.php/julr/article/view/5853>
- Hamid Chalid, A. A. (2019). Menggagas Pelembagaan Constitutional Question Melalui Perluasan Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Menguji Undang-Undang. *Jurnal Konstitusi*, Vol. 16 (No. 2). Doi:10.31078/1628
- Ibrahim, S. I. (2024). Legal Standing Of The Applicant In Constitutional Court Decision Number 90/Puu-Xxi/2023. *Khuluqiyya : Jurnal Kajian Hukum Dan Studi Islam*, Vol. 6 (No. 2). Retrieved From <https://jurnal.staialhikmahdua.ac.id/index.php/khuluqiyya/article/view/135>

- Ichsan, Kantor Hukum Ali, and Sahabat Saksi. "NAFAS KONSTITUSI: KEPENTINGAN KONSTITUSIONAL SEBAGAI PARADIGMA JUDICIAL REVIEW DI INDONESIA." *Jurnal RechtsVinding* 13.1 (2024).
- Irfani, N. (2020). *Asas Lex Superior, Lex Specialis, Dan Lex Posterior: Pemaknaan, Problematika, Dan Penggunaannya Dalam Penalaran Dan Argumentasi Hukum. Jurnal Legilasi Indonesia*, Vol. 16(No. 3). Retrieved From https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/75194426/pdf-libre.pdf?1637914492=&response-content-disposition=inline%3b+filename%3dasas_lex_superior_lex_specialis_dan_lex.pdf&expires=1731731131&signature=Wzongex7mr82zhxf8it2fjsbfatmm4n8g~193gigbpulxjpep6watxwizru
- Julaiddin, Julaiddin, and Henny Puspita Sari. "Citizen Lawsuit (Gugatan Warga Negara) Terhadap Penyelenggara Negara Dalam Mencari Keadilan." *Unes Journal of Swara Justisia* 3.1 (2019).
- Kelilauw, A. A., & Firmantoro, Z. A. (2024). Analisis Legal Standing Dan Konsistensi Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Materiil Uu Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum: Studi Kasus Putusan No.90/Puu-Xxi/2023. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora, & Politik*, Vol. 4(No. 2). Retrieved From <https://dinastirev.org/jihhp/article/view/1856>
- Kiki, Agustin. *Dampak Pemilihan Umum Serentak Terhadap Pemenuhan Hak Memilih Warga Negara*. Diss. Universitas Andalas, 2019.
- Masrufah, & Wibowo, A. (2023). Kedudukan Dan Wewenang Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia. *Jurnal Penelitian Multidisiplin, SURABAYA*, Vol. 2(No. 1). Retrieved From <https://journal.pbnsurabaya.co.id/index.php/jupm/article/view/108>
- Nasir, Cholidin. "Judicial Review di Amerika Serikat, Jerman, dan Indonesia." *Jurnal Hukum Progresif* 8.1 (2020).
- Nurviani, Puspita Listya. *Legal Standing Pihak Ketiga Yang Berkepentingan Dalam Praperadilan*. Diss. Universitas Airlangga, 2014.
- Pelokilla, Jerimas. "UUD 1945 Sebagai Landasan Konstitusional Terhadap Perlindungan Hak Warga Negara Indonesia." *JOCER: Journal of Civic Education Research* 1.1 (2023).

- Prasetio, A. I. (2022). Problematika Peraturan Mahkamah Konstitusi Dan Implikasinya. *Jurnal Konstitusi*, Vol. 19 (No. 4). Retrieved From <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/1943>
- Putra, A. (2021). Sifat Final Dan Mengikat Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang. *Jurnal Yudisial*, Vol. 14 (No. 3). Doi:10.29123/425
- Ridwan, Fahmi, K., & Ismansyah. (2024). Pengajuan Upaya Hukum Banding Terhadap Putusan Bebas Dalam Perkara Tindak Pidana Pemilu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Di Kota Solok Tahun 2019. *Unes Journal Of Swara Justisia*, Vol. 7 (No. 4). Retrieved From <https://www.swarajustisia.unespada.ac.id/index.php/ujsj/article/view/429>
- Rinaldy Bima, Muhammad, et al. "Kedudukan Hukum Warga Negara Asing Dalam Pengujian Aturan Hukum Di Indonesia." (2023).
- Rokilah, R. (2020). The Role Of The Regulations In Indonesia State System. *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4 (No. 1). Doi:10.30656/1.2216
- Saifulloh, Putra Perdana Ahmad, Amancik Amancik, and Sonia Ivana Barus. "Penataan Ulang Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia." *Jurnal Hukum Sasana* 10.1 (2024).
- Saputri, Novi Eka, and Eny Kusdarini. "Kontribusi Sistem Hukum Eropa Kontinental Terhadap Pembangunan Sistem Hukum Nasional Di Indonesia." *Masalah-Masalah Hukum* 50.4 (2021).
- Septian, Luffi, Teguh Aljauza, and Christina Juliane. "Analisis Sentimen Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Batas Usia Capres dan Cawapres Menggunakan IndoBERT." *The Indonesian Journal of Computer Science* 12.6 (2023).
- Siagian, Erick Christian Fabrian, et al. "Sejarah Sistem Hukum Eropa Kontinental (Civil Law) Dan Implementasinya Di Indonesia." *Jurnal Lex Specialis* 2 (2021).
- Siti Halilah, M. F. (2021). Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli. *Jurnal Siyasah*, Vol. 4 (No. 2). Retrieved From <https://ejournal.an-nadwah.ac.id/index.php/siyasah/article/view/334>
- Sujono, I. (2021). Urgensi Penemuan Hukum Dan Penggunaan Yurisprudensi Dalam Kewenangan Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, Vol. 18 (No. 3). Retrieved From <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/1835>

- Tasyukur, Tasyukur, Muksalmina Muksalmina, and Nabhani Yustisi. "Kekuatan Putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat (Mpr) Terhadap Pemakzulan Presiden Dan/Atau Wakil Presiden Di Indonesia." *Seikat: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum* 2.1 (2023).
- Tohadi, T., & Prastiwi, D. E. (2020). Rekonstruksi Hukum Dalam Mewujudkan Kepatuhan Pembentuk Undang-Undang Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Sebagai Mekanisme Checks And Balances. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol. 11(No. 1). Retrieved From <https://Rechtsvinding.Bphn.Go.Id/Ejournal/Index.Php/Jrv/Article/View/849>
- Vagunaldi, Vagunaldi Vagunaldi, et al. "Analisis Hukum Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/Puu-XXI/2023 Pasal 169 Huruf Q UU 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu." *AL-MIKRAJ Jurnal Studi Islam dan Humaniora (E-ISSN 2745-4584)* 5.01 (2024).
- Viedini, A. G. (2024). Antara Keadilan Dan Etika Politik: Mahkamah Konstitusi Dan Batas Usia Calon Presiden Dalam Perspektif Aksiolog. *Action Research Literate*, Vol. 8 (No. 1). Doi:10.46799/242
- Viedini, A. G., Rahmasari, C. A., & Kurniawan, S. S. (2024). Antara Keadilan Dan Etika Politik: Mahkamah Konstitusi Dan Batas Usia Calon Presiden Dalam Perspektif Aksiolog. *Action Research Literate*, Vol. 8(No. 1), 73. Doi:10.46799/1.242
- Wibowo, Riyanto. "Larangan satuan pengamanan berserikat dalam perspektif jaminan hak konstitusional warga negara (analisa surat edaran kapolri nomor; b/194/i/2013/baharkam)." (2018).
- Wicaksono, Dian Agung. "Dynamics of Granting Legal Standing to the Indigenous Community in Constitutional Review of Law: Dinamika Pemberian Kedudukan Hukum Pemohon bagi Masyarakat Hukum Adat dalam Pengujian Undang-Undang." *Jurnal Konstitusi* 20.3 (2023).
- Wicaksono, D. A. (2022). Quo Vadis Pendirian Mahkamah Konstitusi Dalam Menguji Undang-Undang Cipta Kerja Dan Implikasinya Terhadap Kegamangan Pemerintah Daerah Dalam Melaksanakan Kewenangan Mengatur. *Jurnal Rechtsvinding : Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol. 11(No. 1), 78-93. Retrieved From https://www.researchgate.net/profile/Dian-Agung-Wicaksono/publication/364490081_Quo_Vadis_Pendirian_Mahkamah_Konstitu

si_Dalam_Menguji_Undang-

Undang_Cipta_Kerja_Dan_Implikasinya_Terhadap_Kegamangan_Pemerintah_Daerah_Dalam_Melaksanakan_Kewenangan_Mengatur/L

Wicaksono, D. A. (2023). Dynamics Of Granting Legal Standing To The Indigenous Community In Constitutional Review Of Law : Dinamika Pemberian Kedudukan Hukum Pemohon Bagi Masyarakat Hukum Adat Dalam Pengujian Undang-Undang. *Jurnal Konstitusi*, Vol. 20 (No. 3). Doi:10.31078/2037

Widinarsih, Dini. "Penyandang disabilitas di indonesia: perkembangan istilah dan definisi." *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial* 20.2 (2019).

Zaman, Nurus. "A Politik Hukum Diseting Opinion Pengujian UU Terhadap UUD 45 Dalam Rangka Mencari Kebenaran Hukum: Peran Dissenting Opinion dalam Putusan Mahkamah Konstitusi: Perspektif Hakim dan Penafsiran Hukum." *Jurnal Konstitusi* 21.3 (2024).

Putusan MK & Undang - Undang

Putusan MK No. 006/PUU-III/2005, P. M. (n.d.). Retrieved from <https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/Putusan006PUUIII2005tgl310505ttgPilkada.pdf>

PMK No. 2 Tahun 2021. (n.d.). Retrieved from https://s.mkri.id/public/content/pmk/394_210420014128.pdf

Putusan MK No. 29/PUU-XXI/2023. (n.d.). Retrieved from https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_mkri_9329_1697427307.pdf

Putusan MK No. 51/PUU-XXI/2023. (n.d.). Retrieved from https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_mkri_9330_1697427356.pdf.

Putusan MK Nomor 011/PUU-V/2007. (n.d.). Retrieved from <https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/Putusan006PUUIII2005tgl310505ttgPilkada.pdf>

Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023. (n.d.). Retrieved from https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_sidang_Putusan11PUUV2007ttgPLTPgl20September2007.pdf

UU No. 8 Tahun 2011. (n.d.). Retrieved from <https://www.kemhan.go.id/itjen/wp-content/uploads/migrasi/peraturan/UU0082011.pdf>

UU No. 8 tahun 2011, UU No. 24 Tahun 2003, PMK No. 2 Tahun 2021. (n.d.).

UU No.24 Tahun 2003. (n.d.). Retrieved from https://jdih.mahkamahagung.go.id/storage/uploads/produk_hukum/file/03uu024.doc

SKRIPSI

Acara MK. (n.d.). Retrieved from

https://r.search.yahoo.com/_ylt=AwrjdGnlLTtnMV0Qm7tXNyoA;_ylu=Y29sbwNncTEEcG9zAzEEdnRpZAMEc2VjA3Ny/RV=2/RE=1733141221/RO=10/RU=https%3a%2f%2frepo.sitory.uinsaizu.ac.id%2f24245%2f/RK=2/RS=IT2LZfBXeDGzsgBb7aNtGJExUSc-



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A